

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pembangunan ekonomi selalu menjadi tolok ukur keadaan perekonomian pada suatu wilayah. Dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik untuk menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Tingginya ekonomi di suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap menjadi strategi unggul dalam pembangunan ekonomi.

Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dan memiliki perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari bagi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011).

Pembangunan adalah proses yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam setiap masyarakat, struktur sosial dan lembaga nasional serta pengurangan ketimpangan, percepatan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan (Smith

dan Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita & Made, 2013).

Suatu perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan suatu ketimpangan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin besar atau semakin meningkat. *Regional Disparities* atau ketimpangan wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat saja, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah Negara (Sirojuzilam, 2005). Menurut Adisasmita (2004), daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar.

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahtraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif dari adanya sebuah ketimpangan di Jawa Barat salah satunya yaitu meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2022 adalah sebanyak 4,05 juta orang. Persentase penduduk miskin tersebut mencapai 7,98 persen dari total jumlah penduduk. BPS juga mencatat persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2022 sebesar 7,52 persen, sementara di wilayah perdesaan sebesar 9,75 persen. Artinya angka kemiskinan lebih besar terdapat di perdesaan Jawa Barat.

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan pembangunan wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

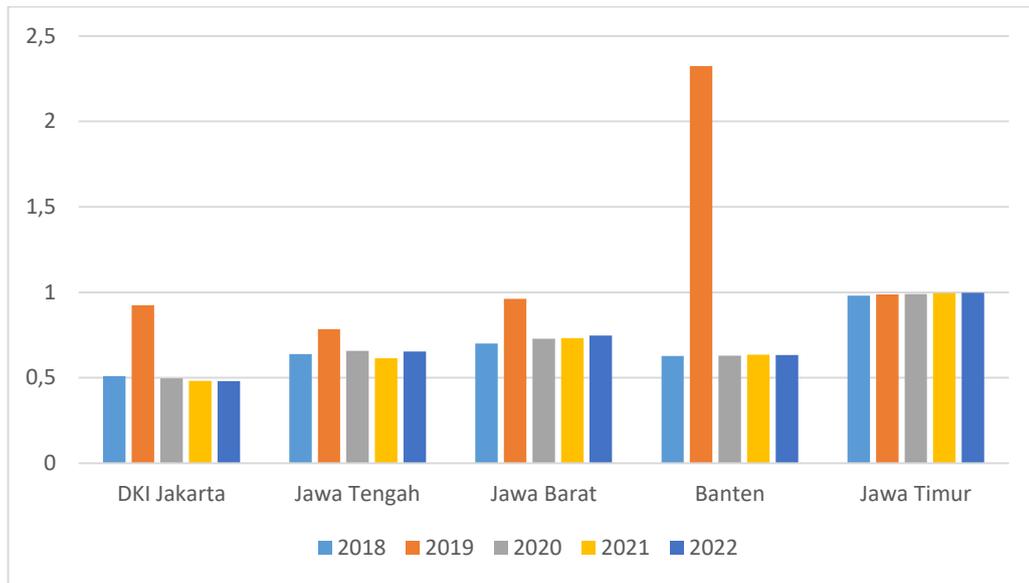
1. Perbedaan sumber daya alam
2. Kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Selain itu juga, ketimpangan muncul karena ada perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing masing wilayah. Ketimpangan antar daerah ini tentu nya dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain seperti munculnya kecemburuan sosial, kerawanan

disintegrasikan wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam (Adisasmita, 2014).

Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Namun kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh semua provinsi di seluruh Indonesia secara merata. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan antar daerah. Ketimpangan masih sangat terlihat di Indonesia, pulau Jawa yang menjadi tumpuan ekonomi bagi pemerintah pun masih belum bisa terlepas dari isu ketimpangan. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat yang ternyata tidak terlepas juga dari sebuah ketimpangan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Berada dalam satu pulau dengan Ibu Kota Negara, membuat perekonomian Provinsi Jawa Barat terbilang cukup mampu bersaing. Namun dibalik hal tersebut, tentu saja Provinsi Jawa Barat pun memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah ketimpangan.



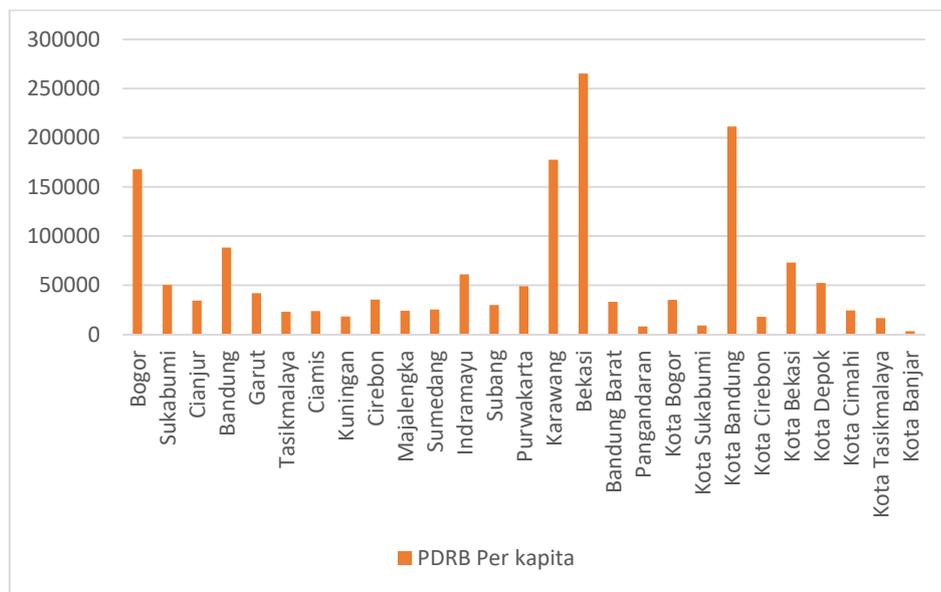
Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2022 (Data Diolah)

Gambar 1.1 Indeks Williamson Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa indeks ketimpangan yang terdapat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018-2022 yang diolah menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat ketimpangan di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota dengan karakteristik ekonomi, demografi serta sumber daya alam yang berbeda beda. Pendapatan perkapita masyarakat yang cukup tinggi tidak terjadi diseluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggal di Provinsi Jawa Barat pun masih belum merata, masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Angka PDRB yang tertinggi hanya didominasi oleh beberapa

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sedangkan untuk Kabupaten/Kota lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai ke angka 50%.



Sumber : BPS, PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Gambar 1.2 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas hanya ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 yang memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi. Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi diantaranya yaitu Bogor, Karawang, Bekasi dan Kota Bandung. Sedangkan PDRB per kapita Kota Banjar adalah yang terkecil di Provinsi Jawa Barat, dan untuk besarnya PDRB per kapita Kabupaten/Kota yang lainnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Berdasarkan data tersebut, kemungkinan terjadi ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun ketimpangan tersebut bisa juga terjadi karena pembangunan yang tidak merata dan konsentrasi ekonomi yang hanya berpusat pada kabupaten/kota tertentu saja menyebabkan penyebaran penduduk jadi tidak merata di wilayah Jawa Barat.

Menurut Jhingan (1993) dalam teori Myrdal, ketimpangan berkaitan erat dengan adanya sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba ini yang menjadikan berkembangnya pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan laba tinggi, sementara itu wilayah-wilayah yang lain akan tetap terlantar. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi daripada dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya adalah investasi.

Investasi merupakan suatu perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Selain investasi, salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu pola pemusatan (aglomerasi) dimana terdapat berbagai jenis industri

di suatu tempat tertentu. Untuk menganalisis pertumbuhan suatu wilayah maka harus dipahami mengenai kekuatan aglomerasi, manfaat yang ditimbulkan dari aglomerasi tersebut, salah satunya adalah penghematan skala (*scale economies*), yaitu terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar merupakan akibat dari investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan yang memungkinkan akan dapat dilakukan pemanfaatan pabrik dan peralatan dalam skala besar sehingga dapat membagi beban biaya tetap pada berbagai unit yang terdapat dalam sistem produksi (Bertha P.Siahaan, 2010).

Industri akan cenderung terpusat pada daerah yang memiliki potensi besar dengan akses yang cepat untuk memperoleh bahan baku. Kota pada umumnya menawarkan kelebihan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, menarik untuk melakukan investasi baru dan teknologi, melihat dari hal tersebut maka banyak industri yang tumbuh dalam perkotaan. Persebaran industri yang tidak merata maka dapat menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, karena hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu.

Selain investasi dan aglomerasi, ada lagi beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Menurut Lessmann (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Dalam penelitian Lessmann (2006) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan ketimpangan wilayah.

Investasi, aglomerasi, pengangguran merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan. Tetapi ternyata tidak hanya itu, ketidakmerataan

suatu pembangunan infrastruktural pun menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Peningkatan infrastruktur dapat menjadi pilihan strategis yang dilakukan dalam hal peningkatan pertumbuhan dan juga pemerataan di Indonesia.

Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik pula, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru (Iqbal dkk., 2017). Dengan adanya fasilitas yang baik nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Salah satu fokus utama pada masa pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan pemerintah mengingat masih minimnya infrastruktur yang tersedia di daerah-daerah Indonesia. Program tersebut masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan perwujudan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terlihat bahwa dari 7 (tujuh) agenda RPJMN IV tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) tugas terkait pengembangan daerah dengan tujuan menurunkan ketimpangan dan memperkuat infrastruktur untuk mencapai pengembangan ekonomi dan layanan dasar (Bappenas, 2019).

Selain pertumbuhan ekonomi Provinsi, rupanya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah Kabupaten/Kota juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan suatu pembangunan berimbang pada setiap wilayah di Kabupaten/Kota. Ketidakmerataan yang menyebabkan suatu ketimpangan ini merupakan masalah yang cukup serius dan harus dicarikan penyelesaiannya. Menurut (Saputra, 2004) *Regional Income Disparities*

(Ketimpangan antar daerah) dapat menimbulkan kecemburuan sosial, disparitas ekonomi yang semakin tajam dan perpecahan antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul **“ANALISIS DISPARITAS ANTARWILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, identifikasi masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia: Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada setiap daerah dapat memicu adanya konflik antar daerah dalam proses pembangunan. Selain itu, perbedaan potensi daerah di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dapat menyebabkan adanya daerah yang menikmati sendiri pendapatannya dari hasil penggunaan sumberdaya tersebut. sehingga masalah-masalah tersebut menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Pembangunan daerah yang tidak merata: Suatu pembangunan dalam daerah sangat dibutuhkan guna untuk menunjang dan memperbaiki suatu perekonomian daerah. Namun saat ini masih banyak daerah termasuk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dimana pembangunan daerah

nya tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan dalam suatu daerah akan menyebabkan suatu kesenjangan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan lain sebagainya.

3. Perbedaan tingkat pendapatan: Suatu perbedaan dalam tingkat pendapatan akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang selanjutnya akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah semakin membesar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketimpangan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh investasi, aglomerasi, tingkat pengangguran dan infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi, aglomerasi, tingkat pengangguran dan infrastruktur terhadap ketimpangan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan praktis.

1.1.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi dalam kajian baru terkait suatu fenomena ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah topik untuk memperdalam kajian tersebut serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta acuan bagi lembaga pendidikan yang ada khususnya Universitas Pasundan.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam sarana informasi serta edukasi yang berguna khususnya untuk lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu ekonomi.

2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan literasi serta edukasi ilmu pengetahuan baru umumnya di bidang ekonomi yang terus melekat

pada khalayak umum dan khususnya di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pasundan.

3. Bagi Mahasiswa/i

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi baru mengenai disparitas pendapatan / ketimpangan pendapatan antar wilayah ataupun kepada mahasiswa yang tertarik untuk meneliti kajian ini lebih lanjut.

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tantangan dan ilmu pengetahuan baru khususnya di bidang ekonomi bagi penulis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis sehingga suatu saat dapat berguna kehidupan selanjutnya.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi yang berfokus pada disparitas pendapatan antar kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Asumsi serta fenomena yang mendasari penelitian ini adalah suatu perekonomian daerah yang tinggi tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan.